



Tak Berani Tingkatkan Anggaran

PONTIANAK - Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie menyatakan besaran dana APBD 2016 yang diajukan pemprov tetap sama dengan tahun sebelumnya. Hingga saat ini Pemprov Kalbar belum berani meningkatkan karena melihat gambaran dana alokasi umum yang dipatok pemerintah pusat. "APBD 2016 tetap mengacu pada 2015 yang sebesar Rp4,29 triliun," ujar Zeet.

Zeet menuturkan gambaran formulasi dana alokasi umum dari pusat yang diterimanya yakni paling besar hanya 10 persen. Jumlah itu jauh dari harapan pemprov yang sebesar 15 persen hingga 20 persen. Dengan jumlah dana alokasi umum tersebut, Pemprov Kalbar tidak berani meningkatkan APBD 2016.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Tak Berani Tingkatkan Anggaran

Sambungan dari halaman 9

"Dengan patokan seperti itu, tidak mungkin (APBD 2016) bisa diatas itu (APBD 2015)," jelas Zeet.

Selain itu, Zeet menuturkan saat ini daya serap anggaran pemprov masih kecil. Hal ini dikarenakan proses tender yang berjalan lamban. Padahal dana untuk pembangunan sudah tersedia.

"Tinggal kecepatan tim proses tender dan pelaksanaan di lapangan. Kalau berjalan mulus, daya serap Desember bisa diatas 90 persen," kata Zeet.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya men-

gatakan daya serap anggaran Kalbar tidak termasuk yang jelek, jika dilihat secara nasional. Hingga Oktober, penyerapan anggaran diatas 63 persen.

Menurut Christiandy, dirinya telah bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, Rabu (20/10). Dalam pertemuan yang juga dihadiri para menteri kabinet kerja dan gubernur di Indonesia itu juga membahas persoalan penyerapan anggaran, dana desa, pilkada serentak, dan paket kebijakan.

"Intinya dalam rapat itu berkaitan daya serap empat hal tersebut," katanya.

Christiandy mengatakan Menkopolkam juga menyampaikan pemerintah daerah tak perlu merasa takut dengan penegakan hukum, sepanjang melaksanakannya sesuai aturan. "Pak Menteri menyampaikan kalau proyek sedang berjalan, sebelum BPK dan BPKP memberikan penilaian, mestinya penegak hukum jangan masuk dulu. Kalau masuk dulu, akan mengganggu proses berjalannya proyek. Hal tersebut disampaikan dihadapan Kapolri dan Kejaksaan Agung," ungkap Christiandy.

Jika BPK sudah memeriksa dan terdapat temuan

penyimpangan, wajib ditindaklanjuti secara hukum.

"Jadi menteri minta, semua yang sudah dianggarkan bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan," tutur Christiandy.

Ia menambahkan dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan kondisi perekonomian sekarang ini bukan krisis tapi hanya perlambatan pertumbuhan perekonomian. "Perekonomian masih tumbuh sekitar empat persen lebih sampai hari ini. Diprediksi sampai akhir tahun sekitar 4,5 persen sampai 5 persen pertumbuhan perekonomian," jelasnya. (uni)